

Dinkes Lebak Cegah Kasus Cacar Monyet Lewat Prokes

LEBAK (IM)- Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Banten melakukan pencegahan kasus cacar monyet melalui penerapan protokol kesehatan (prokes) sehingga dapat memutuskan mata rantai penularan penyakit tersebut.

"Kami minta masyarakat tetap waspada penularan kasus cacar monyet setelah ditemukan di DKI Jakarta," kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak, dr. Firman Rahmatullah dalam keterangan di Lebak, Minggu (22/10).

Pemerintah daerah kini melakukan upaya pencegahan penyakit virus cacar monyet, karena banyak warga Lebak yang bekerja di Jakarta. Potensi penularan sangat berpeluang, sehingga masyarakat harus waspada terhadap penyakit cacar monyet atau carmot.

Karena itu, pihaknya mengajak warga Kabupaten Lebak agar menerapkan protokol kesehatan dengan rutin cuci tangan yang baik dan benar. Selain itu juga menghindari segala jenis kontak dan hindari dengan bahan apapun, seperti tempat tidur, yang pernah bersentuhan dengan hewan yang sakit.

Begitu juga pisahkan pasien yang terinfeksi cacar monyet dari orang lain yang mungkin berisiko tinggi untuk terinfeksi. "Kami berharap masyarakat berpartisipasi aktif dalam melakukan upaya pencegahan dengan menerapkan protokol kesehatan itu," kata dr. Firman.

Menurut dia, pihaknya hingga kini belum menerima laporan kasus dugaan carmot dari layanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas maupun klinik.

Saat ini, hanya sebatas menerima laporan rata-rata penyakit yang pada umumnya dan belum ada dugaan carmot itu. Ciri-ciri gejala penyakit carmot itu di antaranya demam yang ditandai dengan suhu tubuh di atas 38,5 derajat Celsius juga sakit kepala dan nyeri otot.

Selain itu terjadi pembengkakan kelenjar getah bening dan cepat kelelahan serta ruam dengan wajah juga luka pada kulit. Dengan demikian, jika mengalami gejala seperti itu harus segera mendatangi pelayanan kesehatan untuk menjalani perawatan dan pengobatan medis. ● pra



PERINGATAN HARI OWA SE-DUNIA

Aktivis lingkungan melakukan aksi pada peringatan Hari Owa se-Dunia di Lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat, Minggu (22/10). Pusat Studi Komunikasi Lingkungan Universitas Padjajaran bersama Gibbonesia menggelar kampanye pelestarian Owa Jawa yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Owa Jawa sebagai spesies primata yang terancam punah.

Pemkot Tangerang Berharap Sistem RDF di TPA Rawa Kucing Segera Diterapkan

Pemerintah Kota Tangerang telah lama berencana meninggalkan sistem pengelolaan sampah open dumping yang berisiko pencemaran lingkungan dan musibah kebakaran seperti yang terjadi di TPA Rawa Kucing. Untuk menyelesaikan persoalan sampah di kota Tangerang, antara lain lewat penggunaan maggot dan sistem RDF.

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kota Tangerang berharap dapat segera mengubah sistem pengolahan sampah TPA Rawa Kucing dari open dumping menjadi Refused Derived Fuel (RDF). Pada saat ini Pemkot Tangerang menunggu Kementerian Lingkungan Hidup

(KLHK) segera menerbitkan Persetujuan Teknis (pertek) sistem RDF yang mengubah sampah menjadi energi untuk menggantikan sistem open dumping di TPA Rawa Kucing.

TPA Rawa Kucing, yang berada di Kelurahan Keadaung Wetan, Kecamatan

Neglasari, Kota Tangerang, dilanda kebakaran terbakar sejak Jumat siang (19/10). Hingga Minggu siang, api yang membakar tempat sampah itu belum juga padam.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Tihar mengatakan Pertek RDF diterbitkan Pemkot Tangerang dan pihak terkait dalam proyek strategis nasional itu bisa mengurus dokumen yang lainnya. "Karena sejak 9 Maret 2022 sampai sekarang surat-surat ini belum keluar," ujarnya Minggu (22/10).

Menurut Tihar, pengelolaan sampah Kota Tangerang masuk Proyek Strategis Nasional. Sehingga sudah seharusnya semua pihak bisa bekerja sama menjalankan tugasnya masing-masing demi kepentingan negara.

Pemerintah Kota Tangerang telah lama berencana meninggalkan sistem pengelolaan sampah open dumping yang berisiko pencemaran lingkungan dan musibah kebakaran seperti yang terjadi di TPA Rawa Kucing.

Menurutnya, beberapa pendekatan telah dilakukan oleh Pemkot Tangerang untuk menyelesaikan persoalan sampah di kota Tangerang, antara lain lewat penggunaan maggot dan sistem RDF yang telah digunakan Pemprov DKI Jakarta di TPST Bantargebang. "Sampai terakhir kota Tangerang ditunjuk menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional untuk pengelolaan sampah lewat Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL)," kata Tihar.

Dia menegaskan, ini menunjukkan Pemkot Tangerang berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan sampah. "Kalau ini enggak jalan risiko pencemaran lingkungan dan musibah kebakaran akibat dari sistem open dumping akan terus ada," ujarnya.

Tihar mengatakan pengelolaan sampah memerlukan kerjasama semua pihak. Termasuk dalam menuntaskan program PSEL yang menjadi bagian dari proyek Strategis Nasional. "Mitra pelaksanaan pembangunan PSEL belum bisa melaksanakan pembangunan karena masih menunggu Amdal dari KLHK dan PJB dari PLN," paparnya.

TPA Rawa Kucing milik Pemerintah Kota Tangerang seluas 34 hektar sampai saat ini menggunakan sistem open dumping. ● pp

Pemkot Tangsel Jabarkan Lima Upaya Hadapi Kenaikan Bahan Pokok pada 2024

TANGSEL (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel menjabarkan lima upaya dalam menghadapi kenaikan bahan pokok pada tahun 2024.

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan, sehubungan dengan prediksi kenaikan harga bahan pokok yang akan berdampak pada terjadinya inflasi pada tahun 2024, Pemkot Tangsel telah menyiapkan lima langkah antisipasi.

Terdapat lima upaya menghadapi kenaikan kebutuhan bahan pokok, di antaranya, membuat program gerakan pangan murah yang bekerja sama dengan produsen. Kemudian, mengadakan bantuan paket pangan untuk daerah rentan rawan pangan dan daerah stunting.

Berkoordinasi dengan stakeholder guna memastikan kelancaran jalur distribusi pangan, menyediakan cadangan pangan berkerja sama dengan Badan Pangan Nasional.

Terakhir, membuat program gerakan menanam serentak tanaman pangan dan pemanfaatan lahan Kawasan Pertanian Terpadu yang lebih intensif lagi.

"Kelima upaya dalam menghadapi kenaikan bahan pokok ini juga sudah kita lakukan pada tahun ini, dan akan kita intensifkan dan kita masifkan lagi di tahun 2024. Pada prinsipnya, program-program yang digulirkan memperhatikan dampak langsung yang diterima masyarakat," ujar Benyamin, Minggu (22/10).

Benyamin mengatakan, lima langkah strategis dalam menghadapi kenaikan bahan pokok tersebut telah di-

rancang dan dianggarkan melalui APBD Kota Tangsel 2024 sebesar Rp 29.923.945.984.

"Kita distribusikan melalui program kegiatan perangkat daerah guna mengantisipasi terjadinya inflasi dan kenaikan bahan pokok," ujarnya.

Benyamin menegaskan, terhadap alokasi anggaran program dan kegiatan perangkat daerah yang dapat berimbas kepada masyarakat dan outcome-nya yang langsung dirasakan oleh masyarakat, dalam pelaksanaan akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target dan kinerja sehingga dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Tangsel, Eki Herdiana mengatakan, untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat Tangsel yang jumlah UMKM-nya cukup banyak, akan dialokasikan anggaran sebesar Rp 3.646.837.980 melalui Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).

Anggaran Rp Rp3.646.837.980 ini juga terdapat di dalamnya untuk mendorong pertumbuhan investasi di sektor perdagangan dan jasa dengan pemberian kemudahan regulasi, dukungan insentif, program pemberdayaan dan kemajuan infrastruktur dalam mendukung program pelayanan izin usaha simpan pinjam, dan program pengembangan UMKM. ● pp

Bupati Bogor Tanda Tangan Pernyataan Bersama Ketua Parpol

CIBINONG (IM)- Bupati Bogor, Iwan Setiawan melakukan penandatanganan Pernyataan Bersama para Ketua Partai Politik (Parpol) Kabupaten Bogor untuk Mensukseskan Pemilihan Umum 2024 agar berlangsung aman, kondusif dan berintegritas, yang berlangsung di Gedung Serbaguna 1 Setda, Jumat (20/10).

Bupati Bogor mengungkapkan, penandatanganan pernyataan bersama bertujuan untuk menjaga penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 agar berlangsung sukses, aman, lancar, kondusif, berkualitas dan berintegritas.

"Hari ini kita tanda tandani kesepakatan bersama dengan seluruh peserta Pemilu yaitu sedikitnya 18 pimpinan partai di Kabupaten Bogor. Kesepakatan

bersama ini penting kita lakukan untuk menjaga kondusifitas, saya yakin para peserta ini bisa menjaga kondusifitas suksesi Pemilu tahun 2024.

Dalam kesempatan ini, Bupati Bogor juga meminta kepada Bawaslu sebagai pengawas dan KPU sebagai penyelenggara bisa bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, keadilan, kepastian dan kondusifitas Pemilu 2024.

"Terkait ketertiban, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memiliki Perda No 4 tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum. Tolong dijaga dan tolong juga kepada dinas yang terkait untuk menerapkan itu dengan adil jika ada pihak yang mengganggu kondusifitas di Kabupaten Bogor," ungkapnya.

Menurutnya, ia sebagai kepala daerah bertanggung jawab menjaga wilayah Kabupaten Bogor dengan bekerjasama dengan Forkopimda. "Untuk itu saya mengajak seluruh peserta Pemilu untuk bersama-sama mewujudkan Pemilu yang aman, damai, bermartabat, dan berintegritas untuk kemajuan bangsa," tukasnya.

Selanjutnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Hadijana menyampaikan, kegiatan tersebut adalah salah satu upaya untuk mensukseskan Pemilu tahun 2024 agar tercipta situasi yang aman, damai dan kondusif. "Semua tahapan dapat dilaksanakan dengan aman dan damai mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pasca Pemilu," tukasnya. ● gio



Guna menciptakan Pemilu damai, Bupati Bogor Iwan Setiawan melakukan penandatanganan pernyataan bersama dengan para ketua parpol.

Ribuan Lowongan Kerja Bakal Tersedia di Job Fair Disnakertrans Provinsi Banten

SERANG (IM)- Ribuan lowongan kerja bakal tersedia di Job Fair 2023 yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten. Perhelatan Job Fair 2023 ini bakal dilaksanakan di halaman Masjid Raya Al Bantani, KP3B, Kota Serang, pada 25-26 Oktober 2023 nanti.

Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Septo Kalnadi, mengungkapkan bahwa hingga pekan lalu, sudah ada 36 perusahaan yang mendaftar untuk ikut Job Fair 2023. "Targetnya 70 perusahaan, tapi yang sudah mendaftar 36 perusahaan lowongan kerja," ujar Septo, Minggu (22/10).

Kata dia, 36 perusahaan itu semuanya berada di Banten. Lowongan pekerjaan yang disediakan pun ber-

agam. Untuk memudahkan para pelamar kerja, berkas lamaran dapat kirim secara online. "Dalam Job Fair nanti, pelamar bisa melihat jenis lowongan pekerjaan yang ada," ungkapnya.

Meskipun disediakan ribuan lowongan pekerjaan, Septo mengaku, jumlah itu tak sebanding dengan nilai investasi yang masuk ke Banten. Lantaran, perusahaan saat ini lebih banyak mengedepankan padat modal dan teknologi. Sehingga, kebutuhan tenaga kerja berkurang.

Selain itu, ia juga mengungkapkan, jumlah lowongan pekerjaan itu tak sebanding dengan jumlah pekerja Banten yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Meskipun begitu, Septo berharap kegiatan ini dapat mengurangi angka pengangguran di Banten. ● pra

Sukseskan Program ODF, Sekda Dorong Kasi PendKes Kecamatan se-Kab. Bogor



Sekda Kabupaten Bogor mengajak Kasi PendKes Kecamatan se-Kabupaten Bogor untuk perkuat sinergi guna sukseskan Program ODF.

CIBINONG (IM)- Untuk meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat, bisa melalui lingkungan sehat, sanitasi yang baik dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Untuk itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mendorong Kasi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan se-Kabupaten Bogor mengoptimalkan edukasi dan sosialisasi program Open Defecation Free (ODF) melalui Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam pencapaian Open Defecation Free (ODF) di Kabupaten Bogor, dalam pertemuan yang berlangsung di New Ayuda Cisarua, Kamis (19/10).

Burhanudin mengungkapkan, sejalan dengan Karsa Bogor Sehat, membumuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sangat penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama di Kabupaten Bogor yang berkoordinasi pada meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif secara sosial ekonomi.

Lanjut Sekda, mewujudkan Kabupaten Bogor sehat bukan sekadar kesehatan fisik, juga mencakup kawasan pemukiman sehat,

sarana prasarana umum sehat, kawasan industri sehat, pariwisata sehat, ketahanan pangan dan gizi sehat, kehidupan masyarakat sehat yang mandiri serta kehidupan sosial yang sehat.

Untuk itu perlu sinergi dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, pemerintah pusat, daerah, legislatif, kecamatan, desa, pihak swasta dan seluruh masyarakat sebagai kunci keberhasilan dalam mewujudkan Kabupaten Bogor sehat dan masyarakat sehat," ungkap Burhanudin.

Perlu diketahui dalam mewujudkan Kabupaten Bogor sehat ada beberapa hal yang harus dicapai di antaranya Stop Bug Air Besar Sembarangan (SBS) atau Open Defecation Free (ODF) dan mencuci tangan pakai sabun merupakan salah satu dari lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

"Kunci keberhasilan ODF adalah kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Melalui kegiatan ini saya harap koordinasi dapat berjalan efektif untuk menyatukan langkah bersama dalam mengoptimalkan kinerja perangkat daerah dan seluruh stakeholder dalam pencapaian ODF di Kabupaten Bogor demi terwujudnya Karsa Bogor Sehat," tukasnya. ● gio